BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 16A/KEP/BSN/2/2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 28A/KEP/BSN/2/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut atas Reviu Indikator Kinerja Utama Badan Standardisasi Nasional dalam menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, maka dilakukan peninjauan kembali atas Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan perubahan atas Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 28A/KEP/BSN/2/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Kerja Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011;
10. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 28A/KEP/BSN/2/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 45A/KEP/BSN/3/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 28A/KEP/BSN/2/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 28A/KEP/BSN/2/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

PERTAMA : Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 28A/KEP/BSN/2/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional yang telah beberapa kali dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional:

a. Nomor 192/KEP/BSN/8/2015;
b. Nomor 45A/KEP/BSN/3/2016;

diubah Lampirannya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2017
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
NOMOR: 16A /KEP/BSN/2/2017
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 28A/KEP/BSN/2/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

I. Badan Standardisasi Nasional

1. Tugas : melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Fungsi :
   a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional;
   b. pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
   c. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional;
   d. penyelenggaraan kegiatan kerja sama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi;
   e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.
3. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	Sumber Data
Stakeholder Perspectives					
1.	Terwujudnya daya saing produk berstandar	1.	Persentase pertumbuhan ekspor Produk Unggulan Nasional (PUN) yang telah ber-SNI	$P = \left(\frac{X_n - X_{n-0}}{X_{n-0}}\right) x\ 100\%$ Keterangan : P = Persentase pertumbuhan ekspor Produk Unggulan Nasional (PUN) yang telah ber-SNI X_n = Jumlah nilai (Rp) ekspor PUN ber-SNI periode/tahun berjalan X_{n-0} = Jumlah nilai (Rp) ekspor PUN ber-SNI periode/tahun sebelumnya Produk Unggulan Nasional (PUN) = 10 produk ekspor unggulan nasional dari Kementerian Perdagangan (Udang; Kopi; Minyak Kelapa Sawit; Kakao; Karet dan produk Karet; Tekstil dan Produk Tekstil; Alas Kaki; Elektronika; Komponen Kendaraan Bermotor; Furniture)	Laporan hasil survey atas ekspor PUN yang ber-SNI. PJ : Deputi PKS (Puslitbang)
		2.	Persentase pertumbuhan penjualan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri	$P = \left(\frac{X_n - X_{n-0}}{X_{n-0}}\right) x\ 100\%$ Keterangan : P = Persentase pertumbuhan penjualan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri	Laporan hasil survey penjualan produk ber-SNI di pasar retail. PJ : Deputi PKS (Puslitbang)

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	Sumber Data
				X_n = Jumlah nilai (Rp) penjualan produk ber-SNI di pasar retail periode/tahun berjalan Xn-0 = Jumlah nilai (Rp) penjualan produk ber-SNI di pasar retail periode/tahun sebelumnya Pasar Retail = Gerai anggota asosiasi retail (minimarket, supermarket, hypermarket)	
Customer Perspectives					
2	Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	3	Persentase Pertumbuhan Produk Unggulan Nasional yang telah ber-SNI	$P = \left(\frac{X_n - X_{n-0}}{X_{n-0}}\right) x\ 100\%$ Keterangan : P = Persentase Pertumbuhan Produk Unggulan Nasional yang telah ber-SNI X_n = Jumlah Produk Unggulan Nasional yang ber-SNI periode/tahun berjalan Xn-0 = Jumlah Produk Unggulan Nasional yang ber-SNI periode/tahun sebelumnya	Laporan hasil identifikasi PUN yang telah ber-SNI. PALS : Data produk Ber-SNI PPS dan Pusido: Data SNI dalam SISNI Puslitbang : Survey PJ : Deputi PKS (Puslitbang)
				Produk Unggulan Nasional (PUN) = 10 produk ekspor unggulan nasional dan turunannya dari Kemendag (Udang; Kopi; Minyak Kelapa Sawit; Kakao; Karet dan produk Karet; Tekstil dan Produk Tekstil; Alas Kaki; Elektronika; Komponen Kendaraan Bermotor; Furniture)	

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	Sumber Data
		4	Persentase produk ber-SNI di pasar retail	$P = \left(\frac{X}{Y}\right) x\ 100\%$ Keterangan : P = Persentase produk ber-SNI di pasar retail X = Jumlah jenis produk ber-SNI di pasar retail Y = Jumlah jenis produk yang beredar di pasar retail Pasar Retail = Gerai anggota assosiasi retail (minimarket, supermarket, hypermarket)	Laporan hasil identifikasi produk ber-SNI di pasar retail. PALS: Data produk/merk ber-SNI Puslitbang : Survey PJ : Deputi PKS (Puslitbang)
		5a	Persentase pertumbuhan industri/organisasi yang menerapkan SNI	$P = \left(\frac{X_n - X_{n-0}}{X_{n-0}}\right)\ x\ 100\%$ Keterangan : P = Persentase pertumbuhan industri/ organisasi yang menerapkan SNI X_n = Jumlah industri/organisasi yang menerapkan SNI periode/tahun berjalan Xn-0 = Jumlah industri/organisasi yang menerapkan SNI periode/tahun sebelumnya	Laporan hasil identifikasi industri/organisasu yang telah menerapkan SNI PJ : Deputi PSA (PSPS)
		5b	Pertumbuhan jumlah industri yang memperoleh edukasi (pembinaan) penerapan SNI	Jumlah industri/organisasi yang mendapatkan insentif, konsultansi atau diklat BSN terkait penerapan SNI pada akhir tahun ke-n	Data dari Pusdikmas PJ : Dep IPS (Pusdikmas)

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	Sumber Data
Internal Process Perspectives					
3	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI	6a	Persentase SNI yang dimanfaatkan	$P = \left(\frac{X}{Y}\right) x\ 100\%$ Keterangan : P = Persentase SNI yang dimanfaatkan X = Jumlah SNI yang dimanfaatkan Y = Jumlah SNI yang aktif	Data SNI yang dimanfaatkan oleh *stakeholder* berdasarkan permintaan SNI melalui Pusido, Pusdikmas, PALLI, PALS PJ : Deputi PKS (Puslitbang)
		6b	Jumlah SNI yang ditetapkan	Jumlah SNI yang telah ditetapkan	Data dari Komite teknis, BSN (PPS, HOH, Pusido) PJ : Deputi PKS (PPS)
4	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian	7a	Persentase ketersediaan ruang lingkup Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terakreditasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	$P = \left(\frac{X}{Y}\right) x\ 100\%$ Keterangan : P = Persentase ketersediaan ruang lingkup LPK yang terakreditasi X = Jumlah ruang lingkup LPK yang terakreditasi Y = Jumlah kebutuhan ruang lingkup LPK untuk sertifikasi produk Ruang Lingkup = Lingkup kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) berdasarkan ruang lingkup akreditasi KAN	Laporan/data ruang lingkup Lembaga Sertifikasi (LS) dan data SNI yang memerlukan sertifikasi (PSPS, PALS) PJ : Deputi PSA (PSPS)

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	Sumber Data
		7b	Jumlah LPK diakreditasi	Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diakreditasi oleh KAN pada akhir tahun anggaran	Data LPK yang telah diakreditasi oleh KAN (kumulatif) PJ : Deputi PSA (PALLI, PALS)
		8	Persentase skema akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA)	$P = \left(\frac{X}{Y}\right) x\ 100\%$ Keterangan : P = Persentase skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA) X = Jumlah skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat Internasional (MLA/MRA) Y = Jumlah lingkup skema akreditasi yang tersedia di tingkat Internasional Skema Akreditasi = Lingkup pengakuan bidang akreditasi yang dilakukan melalui MLA/MRA dalam forum IAF/ILAC Multilateral Mutual Recognition Arrangements	Data skema akreditasi KAN yang diakui dalam MRA dan MLA PJ : Deputi PSA (PALLI, PALS)
		9	Persentase produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI	$P = \left(\frac{X}{Y}\right) x\ 100\%$ Keterangan : P = Persentase produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI X = Jumlah produk bertanda SNI di pasar yang dimonitor dan sesuai	Laporan/data uji petik SNI PJ : Deputi PSA (PSPS)

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	Sumber Data
				dengan persyaratan SNI Y = Jumlah produk bertanda SNI di pasar yang dimonitor Produk bertanda SNI = Produk yang memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI	
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem ketertelusuran pengukuran	10	Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara Internasional	Jumlah kemampuan pengukuran yang telah diases sesuai dengan skema *International Committee for Weights and Measures (CIPM)* MRA	Data jumlah CMC (*entry*) dari NMI dan DI yang telah diases oleh KAN sesuai dengan skema CIPM MRA (kumulatif) PJ : Deputi PSA (PALLI)
6	Meningkatnya budaya mutu	11	Tingkat persepsi masyarakat terhadap produk ber-SNI	Indeks persepsi masyarakat terhadap produk ber-SNI dengan skala likert 1-5	Survei oleh lembaga survei terpercaya. PJ : Deputi IPS (Pusdikmas)
Learning and Growth Perspectives					
7	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional	12	Opini BPK atas laporan keuangan	Pernyataan pemeriksa dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan BSN pada tahun (n-1)	Data dari BPK RI PJ : Settama (Biro PKT)
		13	Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN yang dilakukan oleh Tim Evaluator KemenPANRB	Data dari KemenPANRB PJ : Settama (Biro HOH)

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	Sumber Data
		14	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN	Hasil penilaian pelaksanaan akuntabilitas kinerja BSN yang dilakukan oleh Tim Evaluator KemenPANRB	Data dari KemenPANRB PJ : Settama (Biro PKT)
		15	Indeks kompetensi dan integritas SDM	$P = \left(\frac{X}{Y}\right) x\ 100\%$ Keterangan : P = Indeks kompetensi dan integritas BSN X = Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan nilai prestasi kerja lebih dari cukup tanpa ada unsur perilaku kerja yang bernilai cukup Y = Jumlah ASN BSN	Data dari Biro HOH PJ : Settama (Biro HOH)
		16	Nilai kepatuhan layanan publik	Penilaian kepatuhan terhadap layanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI. (skala 1-110 menyesuaikan aturan ombudsman)	Data dari Ombudsman RI PJ : Settama (Inspektorat)
		17	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN sesuai dengan UU 20 tahun 2014	$P = \left(\frac{X}{Y}\right) x\ 100\%$ Keterangan : P = Persentase ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN X = Jumlah sarana dan prasarana yang dapat tersedia Y = Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan	Data dari Biro PKT PJ : Settama (Biro PKT)

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	Sumber Data
		14	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN	Hasil penilaian pelaksanaan akuntabilitas kinerja BSN yang dilakukan oleh Tim Evaluator KemenPANRB	Data dari KemenPANRB PJ : Settama (Biro PKT)
		15	Indeks kompetensi dan integritas SDM	$P = \left(\frac{X}{Y}\right) x\ 100\%$ Keterangan : P = Indeks kompetensi dan integritas BSN X = Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan nilai prestasi kerja lebih dari cukup tanpa ada unsur perilaku kerja yang bernilai cukup Y = Jumlah ASN BSN	Data dari Biro HOH PJ : Settama (Biro HOH)
		16	Nilai kepatuhan layanan publik	Penilaian kepatuhan terhadap layanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI. (skala 1-110 menyesuaikan aturan ombudsman)	Data dari Ombudsman RI PJ : Settama (Inspektorat)
		17	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN sesuai dengan UU 20 tahun 2014	$P = \left(\frac{X}{Y}\right) x\ 100\%$ Keterangan : P = Persentase ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN X = Jumlah sarana dan prasarana yang dapat tersedia Y = Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan	Data dari Biro PKT PJ : Settama (Biro PKT)

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Cara Perhitungan	Sumber Data
		18	Jumlah peraturan perundang – undangan di bidang SPK	Peraturan Perundang-Undangan di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) yang ditetapkan	Data dari Biro HOH PJ : Settama (Biro HOH)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA